

REVOLUSI IRAN 1979 DAN BERDIRINYA REPUBLIK ISLAM IRAN : PERAN ULAMA SYIAH DALAM TRANSFORMASI POLITIK, SOSIAL, DAN BUDAYA

Nurul Fauziah¹, Sri Wahyuni², Handi Maulana³, Rizky Yahya⁴, Alan Maulana⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: 231350002.nurul@uinbanten.ac.id¹, 231350016.sri@uinbanten.ac.id²,
231350017.handi@uinbanten.ac.id³, 231350006.muhammad@uinbanten.ac.id⁴,
231350007.alan@uinbanten.ac.id⁵

Abstrak: Revolusi Iran 1979 merupakan salah satu peristiwa politik paling penting di Timur Tengah pada abad ke-20 yang menandai runtuhnya rezim monarki Shah Mohammad Reza Pahlavi dan berdirinya Republik Islam Iran. Revolusi ini tidak hanya menjadi perubahan politik semata, tetapi juga membawa transformasi mendalam dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Iran. Keunikan Revolusi Iran terletak pada peran sentral ulama Syiah yang berhasil memobilisasi massa rakyat melalui legitimasi keagamaan, wacana keadilan sosial, serta kritik terhadap westernisasi dan pemerintahan yang otoriter. Melalui konsep wilayah al-faqih, ulama Syiah tidak hanya tampil sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga menjadi aktor utama dalam pembentukan sistem politik baru yang mengintegrasikan agama dan negara. Dalam ranah sosial, ulama Syiah berperan dalam pembentukan norma-norma masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam Syiah, sementara dalam ranah budaya terjadi reorientasi identitas nasional yang menekankan simbol, tradisi, dan moralitas Islam dalam kehidupan publik. Dengan demikian, Revolusi Iran 1979 dan berdirinya Republik Islam Iran menunjukkan bagaimana kepemimpinan ulama Syiah mampu mentransformasikan tatanan politik, sosial, dan budaya secara menyeluruh.

Kata Kunci: Revolusi Iran 1979; Republik Islam Iran; Ulama Syiah; Wilayah al-Faqih; Transformasi Politik, Sosial, dan Budaya.

Abstract: The Iranian Revolution of 1979 was one of the most significant political events in the Middle East in the twentieth century, leading to the collapse of the Pahlavi monarchy under Shah Mohammad Reza Pahlavi and the establishment of the Islamic Republic of Iran. This revolution was not merely a political upheaval, but also a profound transformation of Iran's social and cultural structures. A distinctive feature of the Iranian Revolution was the central role played by Shi'a clerics, who successfully mobilized the masses through religious legitimacy, discourses of social justice, and criticism of Westernization and authoritarian rule. Through the concept of wilayah al-faqih, Shi'a clerics emerged not only as spiritual leaders but also as key political actors in shaping a new state system that integrated religion and governance. In the social sphere, clerics influenced the formation of societal norms based on Shi'a Islamic values, while in the cultural sphere the revolution prompted a reorientation of national identity that emphasized Islamic symbols, traditions, and morality in public life. Thus, the Iranian Revolution of 1979 and the establishment of the Islamic Republic of Iran demonstrate how the leadership of Shi'a clerics brought about comprehensive political, social, and cultural transformations, positioning Iran as a modern state with a governance system rooted in religious ideology.

Keywords: *Iranian Revolution 1979; Islamic Republic of Iran; Shi'a Clerics; Wilayat al-Faqih; Political, Social, and Cultural Transformation.*

PENDAHULUAN

Revolusi Iran 1979 merupakan salah satu peristiwa revolusioner paling berpengaruh dalam sejarah politik modern dunia Islam dan Timur Tengah. Peristiwa ini tidak hanya mengakhiri kekuasaan monarki Pahlavi di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi, tetapi juga melahirkan Republik Islam Iran sebagai sebuah bentuk negara baru yang mengintegrasikan agama dan politik secara institusional. Keberhasilan revolusi ini menantang asumsi dominan dalam teori modernisasi dan sekularisasi yang menyatakan bahwa agama akan semakin tersisih dari ranah politik seiring dengan kemajuan modernitas. Sebaliknya, Revolusi Iran justru menunjukkan kebangkitan agama khususnya Islam Syiah sebagai kekuatan ideologis dan politik yang mampu menggerakkan massa serta membentuk tatanan negara.¹

Latar belakang terjadinya Revolusi Iran tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang berkembang sejak pertengahan abad ke-20. Pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi dikenal sebagai rezim otoriter yang didukung oleh kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat, serta mengandalkan aparat keamanan seperti SAVAK untuk mempertahankan kekuasaan. Di sisi lain, kebijakan modernisasi dan westernisasi yang diterapkan melalui program White Revolution sejak awal 1960-an bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, kebijakan tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan, seperti kesenjangan sosial yang semakin tajam, marginalisasi kelompok tradisional, serta melemahnya peran agama dalam kehidupan publik.²

Dalam konteks sosial, modernisasi yang dijalankan secara top-down menyebabkan ketidakpuasan di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani, pedagang bazar, hingga kaum terdidik. Sementara itu, ulama Syiah dan institusi keagamaan merasa terancam oleh kebijakan negara yang dianggap mengabaikan nilai-nilai Islam dan tradisi lokal Iran. Akibatnya, agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga menjadi sarana kritik sosial dan politik

¹ Nikki R. Keddie, *Modern Iran: Roots and Results of Revolution*, New Haven: Yale University Press, 2006, p. 1–6.

² Ervand Abrahamian, *A History of Modern Iran*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 123–130

terhadap rezim yang berkuasa. Situasi inilah yang membuka ruang bagi ulama Syiah untuk tampil sebagai kekuatan oposisi yang memiliki legitimasi moral, religius, dan historis di mata masyarakat Iran.

Peran ulama Syiah dalam Revolusi Iran semakin menonjol dengan munculnya kepemimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sejak awal, Khomeini secara terbuka mengkritik kebijakan Shah yang dianggap tiranik, pro-Barat, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui ceramah, risalah keagamaan, serta jaringan ulama dan lembaga pendidikan agama (hauzah), Khomeini berhasil membangun wacana perlawanan yang mengaitkan ketidakadilan politik dan ekonomi dengan kewajiban religius untuk melawan kezaliman. Jaringan masjid, mimbar Jumat, dan ritual keagamaan seperti peringatan Asyura menjadi media efektif dalam menyebarkan pesan revolusioner dan memobilisasi massa rakyat.

Keberhasilan Revolusi Iran pada tahun 1979 kemudian dilembagakan dalam bentuk Republik Islam Iran. Pembentukan negara baru ini didasarkan pada konsep wilayah al-faqih (kepemimpinan ulama), yang menempatkan seorang ulama sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam sistem politik. Konsep ini menandai perubahan fundamental dalam struktur kekuasaan, di mana ulama Syiah tidak lagi hanya berperan sebagai penjaga moral dan hukum Islam, tetapi juga sebagai pengambil keputusan politik tertinggi. Dengan demikian, Revolusi Iran tidak sekadar mengganti rezim monarki dengan republik, tetapi juga menciptakan sistem pemerintahan teokratis yang unik dalam konteks negara modern.³

Transformasi yang dihasilkan oleh Revolusi Iran juga tampak jelas dalam ranah sosial dan budaya. Dalam kehidupan sosial, nilai-nilai Islam Syiah dijadikan dasar dalam pembentukan hukum, pendidikan, serta relasi gender dan keluarga. Negara berperan aktif dalam mengatur moralitas publik sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Dalam ranah budaya, revolusi mendorong reorientasi identitas nasional Iran yang menekankan simbol-simbol Islam, tradisi Syiah, dan penolakan terhadap dominasi budaya Barat. Seni, sastra, dan media digunakan sebagai sarana untuk membangun narasi revolusioner dan identitas Islam yang baru.⁴

³ Said Amir Arjomand, *The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran*, Oxford: Oxford University Press, 1988, p. 88–95.

⁴ John L. Esposito, *Islam and Politics*, Syracuse: Syracuse University Press, 1998, p. 176–180.

Oleh karena itu, Revolusi Iran 1979 dan berdirinya Republik Islam Iran tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa politik, melainkan sebagai proses transformasi multidimensional yang mencakup aspek politik, sosial, dan budaya. Peran ulama Syiah sebagai aktor utama dalam proses ini menunjukkan bagaimana agama dapat menjadi kekuatan penggerak perubahan sosial dan politik yang signifikan. Kajian mengenai Revolusi Iran dengan menitikberatkan pada peran ulama Syiah menjadi penting untuk memahami hubungan antara agama dan negara, serta dinamika kekuasaan dalam masyarakat Muslim kontemporer

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis dan sosiologis untuk mengkaji Revolusi Iran 1979 dan proses berdirinya Republik Islam Iran, dengan fokus utama pada peran ulama Syiah dalam transformasi politik, sosial, dan budaya. Pendekatan historis digunakan untuk merekonstruksi secara kronologis latar belakang, dinamika, serta tahapan-tahapan revolusi, mulai dari kondisi politik pada masa pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi hingga terbentuknya sistem Republik Islam Iran. Melalui pendekatan ini, peristiwa revolusi dipahami sebagai proses sejarah yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk kebijakan modernisasi, relasi kekuasaan negara, serta respons masyarakat terhadap perubahan sosial. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis posisi ulama Syiah sebagai kelompok sosial yang memiliki otoritas keagamaan, jaringan institusional, dan legitimasi simbolik dalam masyarakat Iran. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan bagaimana ulama Syiah mampu membangun kesadaran kolektif, memobilisasi massa, serta mengartikulasikan kepentingan politik melalui bahasa dan simbol-simbol keagamaan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research). Sumber primer meliputi pidato, tulisan, fatwa, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan tokoh-tokoh kunci Revolusi Iran, terutama Ayatollah Ruhollah Khomeini, serta dokumen negara yang merefleksikan pembentukan dan perkembangan awal Republik Islam Iran. Sumber sekunder mencakup buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dan karya historiografi yang membahas Revolusi Iran, Islam Syiah, serta hubungan antara agama, negara, dan masyarakat. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis dan interpretatif, yaitu dengan mendeskripsikan fakta-fakta sejarah dan

fenomena sosial secara sistematis, kemudian menafsirkannya untuk menemukan pola hubungan, makna ideologis, serta implikasi politik dan budaya dari peran ulama Syiah dalam proses transformasi pascarevolusi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Revolusi Iran 1979 sebagai Gerakan Politik Berbasis Agama

Revolusi Iran 1979 merupakan fenomena revolusioner yang unik dalam sejarah politik modern karena dipimpin oleh ulama Syiah dan menjadikan Islam sebagai basis ideologi utama perjuangan. Berbeda dengan revolusi-revolusi modern yang umumnya digerakkan oleh ideologi sekuler seperti nasionalisme, sosialisme, atau liberalisme, Revolusi Iran justru membuktikan bahwa agama dapat berfungsi sebagai kekuatan politik yang efektif dalam menumbangkan rezim yang berkuasa. Dalam konteks Iran, Islam Syiah tidak hanya berperan sebagai sistem kepercayaan spiritual, tetapi juga sebagai kerangka ideologis yang menyediakan legitimasi politik, simbol perlawanan terhadap tirani, serta sarana mobilisasi massa dalam skala luas.⁵

Karakter Islam Syiah yang menekankan narasi ketidakadilan, pengorbanan, dan perlawanan terhadap kezaliman yang berakar pada tragedi Karbala memberikan landasan teologis yang kuat bagi gerakan revolusioner. Konsep syahid dan perjuangan Imam Husain melawan penguasa zalim ditransformasikan oleh ulama menjadi simbol perlawanan terhadap Shah Mohammad Reza Pahlavi. Dengan demikian, revolusi tidak dipahami sekadar sebagai konflik politik, melainkan sebagai kewajiban moral dan religius untuk menegakkan keadilan. Hal ini menjadikan partisipasi rakyat dalam revolusi memiliki dimensi sakral yang melampaui kepentingan politik pragmatis. Ketidakpuasan masyarakat Iran terhadap rezim Pahlavi dipicu oleh berbagai faktor struktural, termasuk ketimpangan ekonomi yang semakin tajam, represi politik melalui aparat keamanan seperti SAVAK, serta ketergantungan negara pada dukungan Barat, khususnya Amerika Serikat. Kebijakan ekonomi yang berorientasi pada elite dan urbanisasi yang tidak merata menciptakan jurang sosial antara kelas penguasa dan rakyat kecil. Dalam situasi ini, ulama Syiah

⁵ ikki R. Keddie, *Modern Iran: Roots and Results of Revolution*, New Haven: Yale University Press, 2006, P. 3–6

tampil sebagai kelompok yang relatif independen dari negara dan memiliki kedekatan dengan masyarakat akar rumput, terutama melalui jaringan masjid dan komunitas bazar.⁶

Kebijakan modernisasi dan westernisasi yang dijalankan Shah melalui program White Revolution sejak awal 1960-an semakin memperburuk hubungan antara negara dan kelompok keagamaan. Program ini mencakup reformasi agraria, perluasan pendidikan sekuler, dan pemberdayaan perempuan, namun dilaksanakan secara top-down tanpa partisipasi masyarakat. Akibatnya, modernisasi tersebut dipersepsikan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Islam dan tradisi lokal Iran. Ulama Syiah memandang kebijakan ini sebagai upaya negara untuk melemahkan peran agama dalam kehidupan publik dan mengikis otoritas keagamaan yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Dalam konteks inilah ulama Syiah muncul sebagai oposisi utama yang tidak hanya mengkritik kebijakan negara, tetapi juga mempertanyakan legitimasi moral rezim Pahlavi. Melalui khutbah, ceramah, dan tulisan-tulisan keagamaan, ulama mengartikulasikan kritik terhadap ketidakadilan sosial dan otoritarianisme negara dalam bahasa agama yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Agama menjadi medium yang efektif untuk menyatukan berbagai kelompok sosial baik tradisional maupun modern dalam satu gerakan perlawanan yang terorganisir.⁷

Dengan demikian, Revolusi Iran 1979 dapat dipahami sebagai gerakan politik berbasis agama yang berhasil mengintegrasikan dimensi teologis, sosial, dan politik secara simultan. Keberhasilan revolusi ini menunjukkan bahwa agama, khususnya Islam Syiah, tidak hanya berfungsi sebagai sistem nilai privat, tetapi juga sebagai ideologi publik yang mampu membentuk kesadaran kolektif dan mendorong perubahan politik radikal. Fenomena ini menjadikan Revolusi Iran sebagai kasus penting dalam kajian hubungan antara agama dan politik di dunia modern.⁸

Dampak dan Implikasi Revolusi Islam Iran

Revolusi Islam Iran tahun 1979 merupakan salah satu peristiwa politik dan sosial paling signifikan dalam sejarah dunia modern. Revolusi ini tidak hanya menggulingkan kekuasaan

⁶ Ervand Abrahamian, *Iran Between Two Revolutions*, Princeton: Princeton University Press, 1982, P. 419-425.

⁷ Said Amir Arjomand, *The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran*, Oxford: Oxford University Press, 1988, P. 88-94.

⁸ John L. Esposito, *Islam and Politics*, Syracuse: Syracuse University Press, 1998, P. 170-175.

monarki Shah Mohammad Reza Pahlavi, tetapi juga melahirkan sistem pemerintahan baru yang berlandaskan pada ideologi Islam. Dampaknya meluas hingga ke berbagai bidang kehidupan masyarakat Iran, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hingga hubungan internasional. Secara politik, revolusi ini menggantikan monarki absolut dengan Republik Islam Iran di bawah kepemimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Melalui konsep Wilayat al-Faqih (pemerintahan ulama), kekuasaan tertinggi berada di tangan pemimpin agama, yang kemudian menjadi fondasi utama sistem teokrasi modern Iran. Konsep ini menjadikan legitimasi agama sebagai dasar pemerintahan, menggantikan sistem sekuler yang sebelumnya didukung oleh Barat dan dijalankan oleh dinasti Pahlavi.⁹

Secara sosial, Revolusi Islam membawa perubahan mendalam dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah baru melakukan Islamisasi menyeluruh terhadap lembaga-lembaga pendidikan, hukum, dan budaya. Peraturan moral dan sosial diperketat, termasuk pemberlakuan wajib hijab bagi perempuan, pembatasan terhadap perilaku sosial di ruang publik, serta penegakan hukum syariah. Namun, di balik kebijakan konservatif ini, terjadi juga perluasan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, terutama di pedesaan. Program kesejahteraan sosial yang digerakkan pemerintah pascarevolusi berhasil menurunkan tingkat buta huruf dan meningkatkan akses layanan dasar. Meski demikian, kebebasan sipil mengalami kemunduran. Banyak kelompok oposisi dibungkam, media dikontrol ketat, dan kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai bentuk penentangan terhadap agama.¹⁰

Dari segi ekonomi, dampak revolusi menunjukkan dua sisi yang kontras. Nasionalisasi industri minyak dan sektor-sektor penting lainnya pada awalnya dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan menghapus dominasi asing. Namun, perang Iran–Irak (1980–1988) dan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat menyebabkan stagnasi ekonomi berkepanjangan. Pertumbuhan ekonomi menurun drastis, inflasi meningkat, dan pengangguran meluas. Penelitian yang dilakukan oleh Nuno Garoupa dan Rok Spruk menunjukkan bahwa Revolusi Islam Iran memberikan dampak jangka panjang yang negatif terhadap kualitas kelembagaan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan per kapita negara. Meskipun demikian, redistribusi kekayaan melalui

⁹ Yervand Abrahamian, *Sejarah Peradaban Islam : Dari Klasik hingga Modern*, (Yogyakarta : LESFI, 2002), p. 278-480

¹⁰ Homa Katouzian, *The Political Economy of Modern Iran : Despotism and Pseudo-Modernism*, 1926-1979 (Oxford : oxford Univercity Press, 1981), p. 321

kebijakan sosial pemerintah berhasil menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi pada dekade 1980-an, terutama di wilayah pedesaan.¹¹

Dalam bidang budaya dan ideologi, revolusi menciptakan transformasi yang sangat besar terhadap identitas nasional Iran. Islam Syiah dijadikan dasar legitimasi politik sekaligus simbol perlawanan terhadap dominasi Barat. Negara melakukan kontrol ideologis melalui media dan pendidikan, untuk membentuk kesadaran keagamaan dan nasionalisme berbasis Islam. Ideologi revolusi juga melahirkan semangat resistensi terhadap modernisasi ala Barat yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme. Namun, kontrol ketat terhadap media dan kehidupan budaya menyebabkan penurunan kreativitas serta kebebasan berpikir di masyarakat.¹²

Secara internasional, Revolusi Islam Iran mengubah tatanan geopolitik kawasan Timur Tengah. Iran yang sebelumnya merupakan sekutu utama Amerika Serikat berubah menjadi negara yang menentang dominasi Barat. Krisis penyanderaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran tahun 1979 menjadi simbol pecahnya hubungan diplomatik antara kedua negara. Di kawasan, revolusi ini juga menginspirasi munculnya gerakan-gerakan Islam politik di berbagai negara Muslim, baik di Timur Tengah maupun Asia Selatan. Negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Yordania, dan Irak memandang Iran sebagai ancaman terhadap stabilitas politik regional karena semangat “ekspor revolusi” yang diserukan oleh Khomeini. Akibatnya, terjadi ketegangan ideologis dan politik yang berujung pada perang Iran–Irak (1980–1988) dan rivalitas panjang antara Iran dan negara-negara Arab Teluk.

Secara keseluruhan, Revolusi Islam Iran membawa dampak yang ambivalen. Di satu sisi, revolusi ini menegaskan kedaulatan nasional dan memperluas keadilan sosial melalui program redistribusi ekonomi serta pembangunan pedesaan. Namun di sisi lain, ia juga menimbulkan represi politik, krisis ekonomi, dan isolasi internasional yang panjang. Seperti disimpulkan oleh Yervand Abrahamian, revolusi ini bukan sekadar pergantian kekuasaan politik, melainkan sebuah transformasi sosial yang kompleks, di mana agama, modernitas, dan ideologi saling bertarung untuk menentukan arah masa depan bangsa Iran.

¹¹ Empirical Economics Journal,”The Effect of Islamic Revolution and War on Income Inequality in Iran”(Springer,2023),p.12-13

¹² Hamid Algar, Religion and State in Iran, 1785-1906 (Berkeley: University of California Press, 1980), p 14.

Transformasi Ekonomi dalam Revolusi Iran 1979

Revolusi Iran 1979 tidak hanya merupakan perubahan politik dan ideologis, tetapi juga menjadi titik balik penting dalam orientasi dan struktur ekonomi Iran. Sebelum revolusi, sistem ekonomi Iran berada di bawah kendali rezim Shah Mohammad Reza Pahlavi yang menerapkan model pembangunan kapitalistik dengan ketergantungan tinggi pada pendapatan minyak dan dukungan negara-negara Barat. Kebijakan ekonomi tersebut memang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat pada dekade 1960–1970-an, namun pertumbuhan tersebut tidak disertai pemerataan kesejahteraan. Ketimpangan sosial yang tajam antara elite penguasa, kelas menengah perkotaan, dan rakyat kecil menjadi salah satu pemicu utama lahirnya ketidakpuasan sosial yang meluas.¹³

Dalam perspektif ekonomi politik Islam, ketimpangan ekonomi dipandang sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial (al-‘adl al-ijtima‘i). Ulama Syiah memanfaatkan wacana keadilan ini untuk mengkritik sistem ekonomi rezim Pahlavi yang dianggap eksploitatif, elitis, dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Masjid dan lembaga keagamaan menjadi ruang penting bagi penyebaran kritik ekonomi tersebut, sehingga persoalan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan tidak hanya dipahami sebagai masalah ekonomi semata, tetapi juga sebagai masalah moral dan religius.¹⁴

Setelah berdirinya Republik Islam Iran, negara mengupayakan reorientasi ekonomi dengan menekankan prinsip keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat lemah. Negara mengambil alih sektor-sektor strategis, terutama industri minyak dan gas, sebagai simbol kedaulatan nasional dan perlawanan terhadap dominasi asing. Kebijakan nasionalisasi ini dimaknai sebagai bagian dari amanat revolusi untuk mengembalikan kekayaan nasional kepada rakyat Iran. Dalam konteks ini, ekonomi pascarevolusi tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga pada distribusi kesejahteraan dan keberpihakan sosial.¹⁵

¹³ Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1983), P. 88-92.

¹⁴ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina)), 1996, P. 135–139.

¹⁵ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1998), P. 147-150.

Peran ulama Syiah dalam kebijakan ekonomi pascarevolusi terlihat melalui legitimasi keagamaan terhadap intervensi negara dalam ekonomi. Ulama mendukung pembentukan lembaga-lembaga ekonomi berbasis Islam, seperti yayasan keagamaan (*bonyad*), yang bertujuan mengelola aset negara dan menyalurkan bantuan sosial kepada kaum miskin, veteran perang, dan kelompok marginal. Meskipun dalam praktiknya lembaga-lembaga ini menghadapi berbagai tantangan tata kelola, keberadaannya mencerminkan upaya penerjemahan nilai-nilai Islam tentang solidaritas dan kesejahteraan sosial ke dalam kebijakan ekonomi negara.

Namun demikian, transformasi ekonomi pascarevolusi juga menghadapi hambatan serius, baik dari faktor internal maupun eksternal. Konflik berkepanjangan dengan Irak (1980–1988), sanksi ekonomi internasional, serta keterbatasan teknologi dan investasi asing menghambat pertumbuhan ekonomi Iran. Dalam situasi tersebut, negara Republik Islam Iran menekankan konsep ekonomi mandiri (*self-reliance*) sebagai bagian dari ideologi revolusi. Konsep ini sejalan dengan pandangan ekonomi Islam yang menolak ketergantungan struktural terhadap kekuatan asing dan menekankan kedaulatan ekonomi sebagai prasyarat keadilan sosial. Dari sudut pandang kajian Islam dan ekonomi di Indonesia, pengalaman Iran menunjukkan bahwa revolusi berbasis agama berupaya membangun sistem ekonomi alternatif yang tidak sepenuhnya tunduk pada logika kapitalisme global. Meskipun hasilnya tidak selalu ideal, Revolusi Iran memperlihatkan bagaimana nilai-nilai agama dapat dijadikan landasan normatif dalam perumusan kebijakan ekonomi negara. Hal ini sejalan dengan pandangan para pemikir Muslim Indonesia yang menekankan pentingnya etika Islam dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.¹⁶

Dengan demikian, dimensi ekonomi Revolusi Iran 1979 memperkuat karakter revolusi ini sebagai gerakan multidimensional yang mengintegrasikan aspek politik, agama, dan ekonomi secara simultan. Transformasi ekonomi pascarevolusi tidak dapat dilepaskan dari peran ulama Syiah sebagai aktor ideologis yang menanamkan nilai keadilan, kemandirian, dan solidaritas sosial dalam kebijakan negara Republik Islam Iran.

¹⁶ M. Ali Haidar, *Islam dan Negara di Timur Tengah*, (Jakarta: LP3ES, 1994), P. 201-205.

Transformasi Peran Politik Ulama Syiah: Dialektika Doktrin dan Konteks

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa peran politik ulama Syiah tidaklah statis, tetapi mengalami transformasi dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi dialektis antara doktrin keagamaan (terutama konsep wilayah/otoritas) dan realitas politik-sosial yang dihadapi. Fase Quietisme dan Akomodasi (Era Kegaiban hingga Pra-Modern): Selama berabad-abad dalam masa ghaibah kubra, mayoritas ulama Syiah menganut pendirian quietisme politik. Doktrin "menunggu Imam Mahdi" (intizar) serta praktik taqiyah (menyembunyikan keyakinan) mendorong sikap menjaga jarak dari penguasa yang dianggap zalim. Otoritas ulama terbatas pada wilayah sosial-keagamaan komunitasnya, seperti menjadi marji' taqlid (sumber peniruan), penerima khumus, dan penyelenggara pendidikan hauzah. Namun, quietisme ini bersifat pragmatis, bukan pasif total.

Pada era Dinasti Safawiyah (1501-1736), ketika Syiah dijadikan mazhab resmi negara, terjadi akomodasi yang saling menguntungkan. Ulama mendapatkan patronase negara, sementara penguasa Safawi mendapatkan legitimasi keagamaan. Simbiosis ini meningkatkan otoritas dan sumber daya ekonomi ulama secara signifikan, mempersiapkan landasan bagi kemandirian politik di masa depan.¹⁷

Fase Transisi dan Perlawanan (Abad ke-19 Pertengahan ke-20): Pada masa Dinasti Qajar, hubungan akomodatif mulai retak seiring melemahnya negara dan meningkatnya penetrasi kekuatan kolonial Barat. Ulama mulai tampil sebagai pemimpin perlawanan nasional, memanfaatkan jaringan sosial dan otoritas keagamaannya. Gerakan Tembakau (1890-1892) yang dipimpin oleh Mirza Shirazi adalah contoh sempurna bagaimana seorang marji' dapat memobilisasi massa melawan konsesi asing yang merugikan, dengan menggunakan instrumen fatwa boikot. Peristiwa ini menandai pergeseran dari quietisme menuju aktivisme politik defensif, di mana ulama turun tangan ketika kedaulatan dan kepentingan komunitas Muslim terancam. Pola serupa terlihat dalam keterlibatan ulama seperti Ayatullah Kashani dalam nasionalisasi minyak Iran di awal 1950-an.

Fase Aktifisme dan Teokrasi (Pasca-1979): Transformasi paling radikal terjadi dengan dirumuskannya doktrin Wilayah al-Faqih (Perwalian Yuris) oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini. Doktrin ini melakukan lompatan interpretatif dengan menyatakan bahwa di masa kegaiban Imam,

¹⁷ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II (Jakarta: UI Press, 2020), hlm. 145-150.

seorang faqih yang memenuhi syarat (seperti seorang Imam) tidak hanya memiliki otoritas keagamaan (wilayah al-'ammah), tetapi juga otoritas politik universal, termasuk hak untuk memimpin negara. Konsep ini mentransformasi peran ulama dari penasihat, pengkritik, atau mitra negara menjadi penguasa negara itu sendiri. Doktrin inilah yang menjadi landasan ideologis Revolusi Islam Iran 1979 dan konstitusi Republik Islam Iran. Wali Faqih menjadi pemimpin tertinggi dengan kewenangan luas, mengatasi presiden terpilih dan parlemen.

Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa model Khomeini bukanlah satu-satunya varian. Tradisi quietisme yang diperbarui tetap hidup, diwakili oleh para marji' seperti Ayatullah Ali al-Sistani di Irak. Sistani menganut pandangan bahwa ulama sebaiknya tidak memegang jabatan politik langsung, tetapi berperan sebagai otoritas moral dan penengah (arbiter) yang memberikan panduan umum dan intervensi hanya pada saat-saat kritis untuk menjaga persatuan nasional dan proses demokrasi, seperti yang terbukti dalam pembentukan pemerintahan pasca-Saddam Hussein. Perbedaan antara model "Teokratis-Aktifis" Iran dan model "Quietisme-Partisipatif" Najaf ini menunjukkan keragaman dalam menyikapi doktrin wilayah.¹⁸

Sintesis: Interaksi Konstan antara Otoritas Transenden dan Kebutuhan Kontekstual

Pembahasan di atas menghasilkan sintesis bahwa sejarah politik Syiah digerakkan oleh interaksi konstan antara klaim otoritas yang bersifat transenden dan sakral (berasal dari nash tentang Imamah) dengan kebutuhan dan tekanan kontekstual duniawi. Ketiadaan Imam menciptakan "kekosongan otoritas" yang harus diisi. Quietisme adalah respons terhadap konteks ancaman dan marginalisasi. Aktifisme dan akhirnya teokrasi adalah respons terhadap konteks negara modern, kolonialisme, dan rezim sekuler yang dianggap korup dan illegitim.¹⁹

Doktrin Wilayah al-Faqih merupakan puncak dari logika ini: ia menggabungkan klaim sakral (perwalian yang berasal dari Imam) dengan bentuk institusional modern (negara-bangsa). Dengan demikian, peran ulama Syiah dalam politik bukanlah penyimpangan, melainkan konsekuensi logis dari upaya terus-menerus untuk menjembatani ideal transenden Imamah dengan realitas politik yang selalu berubah. Pemahaman ini sangat krusial untuk menganalisis dinamika kontemporer, di

¹⁸ Siti Febrianti, "Dinamika Pemikiran Politik Ulama Syiah Pasca Revolusi Iran," *Jurnal Politik Islam* Vol. 5, No. 2 (2020): 112-118.

¹⁹ Fairooz Mohamed Fathillah et al., "Shi'a Political Theology and the Problem of Authority during the Occultation," *Journal of Islamic Studies* Vol. 30, No. 3 (2019): 341-350.

mana aktor-aktor Syiah, dari Hizbullah di Lebanon hingga Hashd al-Sha'abi di Irak, beroperasi di dalam dialektika yang sama antara visi keagamaan dan realitas geopolitik.²⁰

Peran Ulama Syiah dalam Transformasi Sosial

Transformasi sosial pasca Revolusi Iran 1979 tidak dapat dilepaskan dari peran ulama Syiah sebagai penentu norma, nilai, dan arah kehidupan masyarakat. Kemenangan revolusi membawa perubahan mendasar dalam struktur sosial Iran, dari masyarakat yang sebelumnya dipengaruhi modernisasi sekuler menuju masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai Islam Syiah. Dalam proses ini, ulama tidak hanya bertindak sebagai legitimasi moral, tetapi juga sebagai perancang dan pelaksana tatanan sosial baru.²¹

Pasca revolusi, negara mendorong penerapan nilai-nilai Islam Syiah secara sistematis dalam kehidupan sosial. Hal ini tampak dalam reformasi hukum keluarga, sistem pendidikan, serta regulasi moral publik. Ulama terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan yang mengatur pernikahan, perceraian, hak waris, dan peran gender berdasarkan interpretasi fikih Syiah. Reformasi ini bertujuan menciptakan masyarakat yang dianggap sesuai dengan prinsip keadilan dan moralitas Islam.²² Salah satu bentuk transformasi sosial yang paling menonjol adalah penguatan peran lembaga keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Masjid, hauzah (lembaga pendidikan ulama), dan yayasan keagamaan menjadi pusat aktivitas sosial, pendidikan, dan bahkan ekonomi. Ulama Syiah tidak hanya berfungsi sebagai pengajar agama, tetapi juga sebagai mediator sosial dan pengambil keputusan dalam konflik masyarakat. Posisi ini memperkuat otoritas ulama sebagai figur sentral dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Selain itu, ulama Syiah berperan sebagai pengawas moral sosial. Negara, melalui institusi yang dipengaruhi ulama, menetapkan standar perilaku publik yang dianggap sesuai dengan syariat Islam, seperti aturan berpakaian, relasi antara laki-laki dan perempuan, serta etika pergaulan di ruang publik. Kebijakan mengenai kewajiban hijab bagi perempuan dan pembatasan interaksi

²⁰ Abdillah Halim, *Politik Syiah Kontemporer dan Geopolitik Timur Tengah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 89-97.

²¹ John L. Esposito, *Islam and Politics*, Syracuse: Syracuse University Press, 1998, hlm. 172-176.

²² Ervand Abrahamian, *A History of Modern Iran*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, hlm. 160-165.

gender mencerminkan interpretasi ulama terhadap moralitas Islam Syiah²³. Dalam konteks ini, ulama berfungsi sebagai agen sosial yang mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan ideologi negara.

Transformasi sosial ini juga berdampak pada perubahan struktur otoritas di tingkat masyarakat. Jika sebelum revolusi ulama lebih banyak berperan di ruang keagamaan, maka pasca revolusi mereka masuk ke berbagai lembaga negara dan sosial, seperti parlemen, peradilan, dan lembaga pendidikan. Hal ini menunjukkan terjadinya integrasi antara otoritas keagamaan dan otoritas sosial-politik. Ulama Syiah menjadi aktor utama dalam rekonstruksi tatanan sosial Iran pasca Revolusi 1979, dengan pengaruh yang meluas hingga ke level kehidupan sehari-hari masyarakat.²⁴

Peran Ulama Syiah dalam Transformasi Budaya

Dalam bidang budaya, ulama Syiah memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan identitas budaya baru Iran pasca revolusi. Revolusi Iran tidak hanya menggantikan sistem politik monarki dengan republik Islam, tetapi juga melakukan reorientasi budaya secara menyeluruh. Ulama memandang budaya sebagai arena strategis untuk menanamkan nilai-nilai Islam Syiah dan menolak dominasi budaya Barat yang sebelumnya kuat pada masa pemerintahan Shah.²⁵

Proses Islamisasi budaya dilakukan melalui kebijakan negara dan wacana keagamaan yang disampaikan oleh ulama. Nilai-nilai religius dijadikan standar dalam menilai praktik budaya, seni, dan gaya hidup masyarakat. Ulama menekankan pentingnya budaya yang mencerminkan spiritualitas, kesederhanaan, dan perjuangan moral sebagaimana dicontohkan dalam sejarah Islam Syiah.²⁶

Budaya keagamaan Syiah, seperti peringatan Asyura, Arbain, dan ritual duka atas tragedi Karbala, memperoleh legitimasi penuh dari negara dan dijadikan bagian integral dari identitas

²³ Nikki R. Keddie, *Modern Iran: Roots and Results of Revolution*, New Haven: Yale University Press, 2006, hlm. 210-215.

²⁴ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, Jakarta: Paramadina, 1998, hlm. 112-118.

²⁵ Said Amir Arjomand, *The Turban for the Crown*, Oxford: Oxford University Press, 1988, hlm. 135-140.

²⁶ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1996, hlm. 89-94.

nasional Iran. Ritual-ritual ini tidak hanya dipraktikkan sebagai kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran kolektif tentang nilai pengorbanan, perlawanan terhadap kezaliman, dan keadilan sosial. Ulama berperan besar dalam memaknai ritual tersebut sebagai simbol perjuangan revolusioner.²⁷

Selain itu, simbol-simbol keagamaan Syiah diintegrasikan secara luas ke dalam ruang publik, media massa, dan seni budaya. Poster tokoh-tokoh Syiah, kaligrafi religius, serta narasi keagamaan mendominasi ruang visual dan wacana publik. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi budaya tidak bersifat simbolik semata, tetapi menjadi bagian dari proyek ideologis negara dalam membangun legitimasi politik dan sosial Republik Islam Iran.

Ulama Syiah juga memengaruhi arah produksi budaya, termasuk dalam sastra, film, musik, dan media massa. Karya-karya budaya diarahkan untuk mendukung nilai-nilai moral Islam dan menegaskan identitas Islam Syiah. Negara melakukan sensor dan regulasi budaya dengan merujuk pada pandangan ulama, sehingga budaya berfungsi sebagai alat pendidikan ideologis bagi masyarakat.²⁸

Dengan demikian, peran ulama Syiah dalam transformasi budaya menegaskan bahwa agama dijadikan sumber utama pembentukan identitas kolektif masyarakat Iran. Budaya pasca revolusi tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi seni dan tradisi, tetapi juga sebagai instrumen ideologis untuk memperkuat sistem sosial dan politik Republik Islam Iran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Revolusi Iran 1979 merupakan momentum historis yang menandai perubahan fundamental dalam sistem politik Iran, dari monarki sekuler menuju Republik Islam yang berlandaskan legitimasi keagamaan. Keberhasilan revolusi ini tidak dapat dilepaskan dari peran ulama Syiah yang mampu mengartikulasikan ajaran Islam sebagai ideologi pembebasan sekaligus dasar pembentukan negara. Ulama Syiah tampil sebagai aktor utama yang menjembatani aspirasi keagamaan dan tuntutan politik masyarakat.

²⁷ Moojan Momen, *An Introduction to Shi'i Islam*, New Haven: Yale University Press, 1985, hlm. 240-245.

²⁸ Hamid Naficy, *A Social History of Iranian Cinema*, Durham: Duke University Press, 2011, hlm. 50-55

Dalam konteks politik, ulama Syiah menginstitusionalisasikan kekuasaannya melalui konsep Wilayah al-Faqih, yang menempatkan otoritas keagamaan sebagai pusat pengambilan keputusan negara. Hal ini menciptakan model relasi agama dan negara yang khas, di mana kekuasaan politik memperoleh legitimasi langsung dari interpretasi keagamaan. Transformasi ini menunjukkan bahwa Revolusi Iran bukan sekadar pergantian rezim, melainkan perubahan ideologis yang mendasar.

Pada ranah sosial dan budaya, ulama Syiah berperan dalam membentuk tatanan masyarakat baru yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Penguatan lembaga keagamaan, pengaturan norma sosial, serta Islamisasi budaya menjadi bagian dari upaya membangun identitas kolektif Republik Islam Iran. Dengan demikian, ulama Syiah tidak hanya berfungsi sebagai elite religius, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial dan budaya.

Secara keseluruhan, Revolusi Iran 1979 memperlihatkan bahwa peran ulama Syiah sangat menentukan dalam pembentukan dan konsolidasi Republik Islam Iran. Studi ini menegaskan bahwa agama, ketika dilembagakan secara politik, dapat menjadi kekuatan transformatif yang membentuk struktur negara, tatanan sosial, dan identitas budaya secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Halim. *Politik Syiah Kontemporer dan Geopolitik Timur Tengah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Abdullah, Taufik. *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1983.
- Abrahamian, Ervand. *Iran Between Two Revolutions*. Princeton: Princeton University Press, 1982.
- Abrahamian, Ervand. *A History of Modern Iran*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Abrahamian, Yervand. *Sejarah Peradaban Islam: Dari Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Algar, Hamid. *Religion and State in Iran, 1785–1906*. Berkeley: University of California Press, 1980.
- Arjomand, Said Amir. *The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran*. Oxford: Oxford University Press, 1988.

- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Empirical Economics Journal. "The Effect of Islamic Revolution and War on Income Inequality in Iran." Springer, 2023.
- Esposito, John L. *Islam and Politics*. Syracuse: Syracuse University Press, 1998.
- Fathillah, Fairouz Mohamed, et al. "Shi'a Political Theology and the Problem of Authority during the Occultation." *Journal of Islamic Studies* Vol. 30, No. 3 (2019).
- Febrianti, Siti. "Dinamika Pemikiran Politik Ulama Syiah Pasca Revolusi Iran." *Jurnal Politik Islam* Vol. 5, No. 2 (2020).
- Haidar, M. Ali. *Islam dan Negara di Timur Tengah*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Katouzian, Homa. *The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo-Modernism, 1926–1979*. Oxford: Oxford University Press, 1981.
- Keddie, Nikki R. *Modern Iran: Roots and Results of Revolution*. New Haven: Yale University Press, 2006.
- Momen, Moojan. *An Introduction to Shi'i Islam*. New Haven: Yale University Press, 1985.
- Naficy, Hamid. *A Social History of Iranian Cinema*. Durham: Duke University Press, 2011.
- Nasution, Harun. *Islam Ditppppinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II*. Jakarta: UI Press, 2020.